

Implementasi Program kartu Prakerja di Kabupaten Mandailing Natal

Zakiah Nasution¹, Abdullah Akhyar Nasution², Muhammad Bin Abubakar³ Zuhilmi⁴

^{1,2,3,4}Program Magister Administrasi Publik, Fisipol, Universitas Malikussaleh, Aceh

*Corresponding Author: Email: abdullahakhyarnasution@unimal.ac.id

Abstrak

Implementasi Program Kartu Prakerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi Program Kartu Prakerja dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal serta mendeskripsikan dampak Program Kartu Prakerja terhadap pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal. Adapun masalah yang timbul yaitu implementasi dari program Prakerja ini tidak efektif menyelesaikan permasalahan pengangguran khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam menjelaskan hasil penelitian disesuaikan dengan teori dari George Edward wilson yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan pertama komunikasi ialah kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada peserta program Kartu Prakerja di Kabupaten Mandailing Natal. Kedua Sumber daya, segi sumberdaya manusia yang ditugaskan untuk mengawal program Kartu Prakerja ini untuk mencapai tujuannya di Kabupaten Mandailing Natal belum memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai apa yang dibutuhkan program ini. Ketiga disposisi atau sikap pelaksana, kurangnya komitmen dari pelaksana program Kartu Prakerja di Kabupaten Mandailing Natal yaitu dinas ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal untuk menjalankan peran yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Dampak Program Kartu Prakerja terhadap pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal yaitu metode pelatihan yang kurang efektif untuk meningkatkan kompetensi kerja peserta program dan sertifikat pelatihan yang didapat dari program ini belum cukup membantu peserta program untuk diterima kerja pada saat melamar pekerjaan.

Kata kunci: Implementasi, Program, Kartu Prakerja, Mandailing Natal.

Pendahuluan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, yaitu alat administrasi hukum dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. (Budi Winarno, 2002:102). Salah satu kebijakan yang perlu di perhatikan implementasinya adalah kebijakan dalam pengentasan pengangguran di Indonesia. Masalah pengangguran yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial dan ekonomi yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merilis jumlah pengangguran untuk pada periode february 2019 sampai dengan february 2020 mengalami kenaikan menjadi sekitar 6,88 juta orang. Berdasarkan data diatas, pemerintah Indonesia menyadari bahwa terdapat urgensi untuk mengatasi permasalahan ini. sehingga pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang tujuannya untuk menekan angka pengangguran di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 76. Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Sasaran dari program kartu Prakerja ini adalah para pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan juga pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Berdasarkan tujuan utama kebijakan kartu Prakerja ini yaitu untuk menekan angka pengangguran di Indonesia, namun faktanya di lapangan berbeda. Implementasi program yang di mulai pada february 2020 dengan anggaran 20 triliun Rupiah untuk target 5,6 juta orang peserta di seluruh indonesia ini belum mampu menekan angka pengangguran di Indonesia. Karena faktanya di lapangan jumlah pengangguran di Indonesia semakin bertambah

sesuai dengan data yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan februari 2021 yang menyampaikan bahwa angka pengangguran di Indonesia per agustus 2020 menagalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang dan di perkirakan akan terus mengalami peningkatan di tahun 2021.

Kenaikan angka pengangguran ini juga terjadi di Kabupaten Mandailing Natal pasca diterbitkan nya program kartu Prakerja ini. Kabupaten Mandailing Natal ialah salah satu Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang mana menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, angka pengangguran bertambah menjadi 13.387 jiwa (6,50% dari total angkatan kerja). Pada tahun 2021, angka pengangguran bertambah menjadi 13.535 jiwa (6,12% dari total angkatan kerja). Kemudian yang terbaru untuk tahun 2022, angka pengangguran bertambah menjadi 17.461 jiwa (7,64% dari total angkatan kerja). Total jumlah masyarakat yang menganggur di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 17.461 jiwa tahun 2022, sedangkan total penerima kartu prakerja per Oktober 2022 sudah mencapai 17.928 hal ini membuktikan bahwasanya efektivitas program kartu prakerja dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal belum mampu mencapai tujuannya. Jika implementasi dari program Prakerja ini tidak efektif menyelesaikan permasalahan pengangguran khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, dampak yang ditimbulkan adalah naiknya angka pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal. Karena, target utama implementasi kebijakan ini adalah untuk mengatasi pengangguran. Dimana, efeknya adalah akan meningkatnya angka kemiskinan karena turun nya pendapatan Per Kapita. Disamping itu, daya beli masyarakat yang turun akan menimbulkan kelesuan ekonomi dan menurunkan pendapatan negara. Jika kelesuan ini terus berlanjut, akan sulit untuk menaikkan perekonomian di Kabupaten Mandailing Natal.

Landasan Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya teori yang bisa menjawab hasil penelitian di lapangan dan bisa membantu dalam mencari data dimana teori yang digunakan yang berhubungan Implementasi Program Kartu Prakerja Terhadap Pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utaraseperti yang dijelaskan dibawah ini.

a. Kebijakan Publik

Menurut (Amri, 2012, Hal.69) kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumenteknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang

dituju (kelompok target) menjadi terpolasesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

b. Implementasi Program

Implementasi prinsipnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuannya, (Widodo, 2001) dijelaskan secara singkat bahwa implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Dalam analisa kebijakan (Dye & Jonnes, 1971) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksana suatu kegiatan setelah disahkan oleh pihak-pihak berkepentingan yang terorganisir dari agen-agen eksekutif. Implementasi kebijakan adalah suatu pelaksana kegiatan dengan mengikuti beberapa langkah yang ditetapkan terdahulu dalam kebijakan untuk mencapai tujuan (Sebatier & Mazmania, 1986), dalam buku (Budi Winarmo, 2008, Hal.146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam Kebijakan

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan salah satu strategi untuk menganalisis secara detail suatu permasalahan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Mandailing Natal dengan pertimbangan bahwa cukup banyak masyarakat yang ikut dalam Program Kartu Prakerja di daerah tersebut. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan dokumentasi, serta pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022, angka pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal per Agustus 2022 mengalami kenaikan. Hal ini menjadikan Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kabupaten/Kota dengan angka pengangguran terbuka ke-9 tertinggi di Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Pematang Siantar, Medan, Kabupaten Deli Sedang, Kabupaten Tapanuli bagian tengah, Kabupaten Sibolga, Padang Sidempuan, Kabupaten Tebing Tinggi, dan Kota Binjai. Adapun fluktuasi kenaikannya ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mandailing Natal

Keterangan	2020	2021	2022
-------------------	-------------	-------------	-------------

Jumlah Penduduk	472.886	478.062	484.874
Angkatan Kerja	206.000	221.126	228.485
Bukan Angkatan Kerja	106.387	95.703	92.639
Pengangguran Terbuka	13.387	13.535	17.461
Persentase TPT (%)	6,50	6,12	7,64

Sumber: BPS Mandailing Natal Tahun 2023

Total jumlah masyarakat yang menganggur di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 17.461 jiwa tahun 2022, sedangkan total penerima kartu prakerja per Oktober 2022 sudah mencapai 17.928 hal ini membuktikan bahwasanya efektivitas program kartu prakerja dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal belum mampu mencapaitujuannya.

1. Kendala Yang di Hadapi Dalam Implementasi Program Kartu Prakerja Dalam Menurunkan Angka Pengangguran Di KabupatenMandailing Natal

a. Komunikasi

Terkait dengan komunikasi dalam implementasi program Kartu Prakerja dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kebijakan tersebut. Informasi yang diterima masyarakat mengenai program ini tidak detail karena hanya memperoleh informasi-informasi sekilas dari media-media elektronik dan juga dari orang per orang itupun hanya sekedar kapan gelombang pendaftaran dibuka dan ditutup. Sehingga sering terjadi distorsi informasi mengenai program ini. Misalnya mengenai pelatihan yang diambil secara asal- asalan yang mengakibatkan tidak adanya dampak berupa peningkatan kompetensi kerja pada peserta program.

b. Sumberdaya

Berkenaan dengan sumberdaya manusia dalam implementasi program Kartu Prakerja di Kabupaten Mandailing Natal secara kompetensi masih harus ditingkatkan lagi. Berdasarkan peraturan presiden nomor 76 tahun 2020 peran yang harus dijalankan oleh daerah Dinas Ketenagakerjaan ialah sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja, penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah, penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah, fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan padaProgram Kartu Prakerja. Sehingga unit pelaksana tugas yang membidangi program Kartu Prakerja tersebut harus memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjalankan peran-peran tersebut. Di Kabupaten Mandailing Natal sendiri, sumberdaya manusia yang membidangi program Prakerja ini masih belum berkompeten dibidangnya sehingga program ini belum maksimal dalam mengatasi pengangguran di

Kabupaten Mandailing Natal.

C. Disposisi

Berkenaan dengan sikap pelaksana program Kartu Prakerja di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat dari temuan peneliti yang menunjukkan bahwa pihak Dinas Ketenagakerjaan belum memiliki komitmen secara penuh untuk mewujudkan tujuan dari program Kartu Prakerja ini yaitu meningkatkan kompetensi kerja agar jumlah pengangguran bisa menurun dari sebelumnya. Pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal belum berkomitmen penuh untuk menjalankan semua amanat yang tertuang dalam peraturan presiden nomor 76 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Peranan-peranan yang harusnya dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan belum dilakukan sepenuhnya sehingga para peserta program belum mampu memanfaatkan secara maksimal fasilitas yang diberikan dalam program Kartu Prakerja ini. Seharusnya masyarakat memerlukan pendampingan dalam memanfaatkan program Kartu Prakerja ini terlebih lagi dengan sistem yang dilakukan secara online dengan menonton video pelatihan yang disediakan oleh platform-platform digital yang menjadi mitra program Kartu Prakerja. Namun disini pihak dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memanfaatkan secara mandiri fasilitas yang di berikan oleh program Kartu Prakerja ini. sehingga dilapangan acap kali terjadi ketidakefektifan dalam pemanfaatan program ini. Sehingga program Kartu Prakerja ini gagal mencapai tujuannya yaitu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal.

2. Dampak Program Kartu Prakerja Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Mandailing Natal

Dampak Program Kartu Prakerja terhadap pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal jika dilihat dari tujuan program tersebut yaitu meningkatkan kompetensi kerja bagi tenaga kerja di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masalah yang menjadikan implementasi program ini belum tercapai secara maksimal. Dampak yang dirasakan oleh peserta program setelah mengikuti pelatihan belum mampu meningkatkan kompetensinya di bidang pelatihan yang diikuti. Karena dengan metode pelatihan berbasis online dengan menonton video pelatihan yang dibeli dengan voucher yang disediakan belum mampu menciptakan tenaga kerja yang profesional di bidangnya. Terlebih lagi tidak adanya evaluasi yang dilakukan sebelum peserta tersebut dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat. Sehingga tenaga kerja yang masih menganggur tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan karena dengan pelatihan yang diberikan belum cukup mampu bersaing di bidangnya pada saat mendaftar pada sebuah lowongan pekerjaan.

Peserta program Kartu Prakerja memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan setiap bulannya selama 4 bulan agar intensif bisa dicairkan dan diterima oleh peserta program. Karena kurangnya bimbingan dan arahan serta pendampingan dari dinas terkait di Kabupaten Mandailing Natal, sering terjadi kasus peserta program Kartu Prakerja memilih pelatihan secara asal-asalan atau tidak sesuai dengan minat dan bakatnya yang bertujuan agar intensif program Kartu Prakerja nya bisa diterima dan status kepesertaannya bisa dicabut. Sehingga hal ini merugikan peserta itu sendiri karena memilih pelatihan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki maka hasil dari pelatihan juga tidak dapat meningkatkan kompetensi kerja peserta itu sendiri. Hal inilah yang

menjadi penyebab gagalnya program ini dalam mencapai tujuannya.

Kesimpulan

Kendala yang dihadapi dalam implementasi Program Kartu Prakerja dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal jika dilihat dari sisi. Komunikasi ialah kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada peserta program Kartu Prakerja di Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini mengakibatkan peserta dan juga calon peserta kesulitan untuk mendaftar dan mengikuti program Kartu Prakerja. Dilihat dari segi sumberdaya manusia yang ditugaskan untuk mengawal program Kartu Prakerja ini untuk mencapai tujuannya di Kabupaten Mandailing Natal belum memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai apa yang dibutuhkan program ini. Jika dilihat dari sisi disposisi atau sikap pelaksana, Kendala yang dihadapi dalam implementasi Program Kartu Prakerja dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal ialah kurangnya komitmen dari pelaksana program Kartu Prakerja di Kabupaten Mandailing Natal yaitu dinas ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal untuk menjalankan peran yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Dampak Program Kartu Prakerja terhadap pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal jika dilihat dari tujuan program tersebut yaitu meningkatkan kompetensi kerja bagi tenaga kerja di Kabupaten Mandailing Natal karena terdapat beberapa masalah yang menjadikan implementasi program ini belum tercapai secara maksimal yaitu metode pelatihan yang kurang efektif untuk meningkatkan kompetensi kerja peserta program. Kemudian program Kartu Prakerja juga belum mampu menjadikan peserta program menjadi seorang yang profesional di bidangnya. Apalagi jika peserta program memilih pelatihan secara asal-asalan. Dampak yang juga dirasakan peserta yang mengikuti program Kartu Prakerja ini ialah sertifikat pelatihan yang didapat dari program ini belum cukup membantu peserta program untuk diterima kerja pada saat melamar pekerjaan. Sehingga angka pengangguran terus meningkat meskipun program Kartu Prakerja ini telah di implementasikan di Kabupaten Mandailing Natal

Daftar Pustaka

- Ashman, R. M. (2015). An Old Modey for a New Age: Consumer Decision Making in Participatory Digital Culture. *Journal of Customer Behaviour*, Volume.14, No.2, 5- 14.
- Khoirurrosyidin, T. P. (2020). Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid 19. *Journal of Government and Political Studies*, Volume3, No.2, 8-10.
- Khoirurrosyidin, T. P. (2020). Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Government and Political Studies*, Volume.3, No.2, 1-28.
- Palmira Permata Bachtiar, d. (2020). Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid 19: Asesmen Cepat Dari Sudut Pandang Peserta Program. *Jurnal Smeru*, Volume.03, No.3, 1- 23.
- Permata, C. Q. (2021). Analisis Kebijakan Kartu Pra kerja Terhadap Pekerja Yang di PHK Untuk Menanggulangi Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Retrieval*, Volume.1, No.1, 28-30.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional di Jawa Barat. *Patanjala*, Volume.6, No.1, 6